

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

Kebijakan manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis Al Ittifaq Ciwidey Kabupaten Bandung: (1) menerapkan strategi dan nilai-nilai yang bersumber pada agama Islam dan budaya lokal sebagai filosofi organisasi. (2) melakukan pembudayaan ekonomi melalui penanaman nilai, pembiasaan, peneladanan, dan pengalaman nilai. (3) mengembangkan agribisnis dengan menerapkan prinsip INPEKBI (Ilahi, Negeri, Pribadi, Ekonomi, Keluarga, Birahi, dan Ilmihi). (4) menjalankan strategi agribisnis 3L, 3K, 3T, dan 5M. 3 L (pada bisnis lintas agama, pada agama lintas mazhab, dan pada mazhab lintas sektor). 3 K (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas). 3T Tidak boleh ada lahan tidur; Tidak boleh ada sampah ngawur ‘berserakan’; Tidak boleh ada waktu sedetik menganggur. 5M: Meyakinkan (*convincing*); menggalang (*rallying*), menggerakkan (*mobilizing*), *memantau* (*monitoring*), melindungi (*protecting*).

Perencanaan pembiayaan dilakukan melalui sejumlah kegiatan. Aspek-Aspek Pembiayaan Pesantren berbasis Kewirausahaan Sosial Agribisnis Al Ittifaq Ciwidey Kabupaten Bandung Nampak terjadi pada tiga hal, yaitu: a. Analisis Kebutuhan Biaya Pesantren berbasis Kewirausahaan Sosial Agribisnis Al-Ittifaq Ciwidey Kabupaten Bandung (Pelatihan dan bimbingan manajemen, Sarana Prasarana Pesantren, program pendidikan, Penyelenggaraan pesantren salafiah ‘tradisional’, Penyelenggaraan lembaga pendidikan formal, Pengelolaan kelembagaan atau unsur pendukung yayasan, Pembinaan kelompok tani dan UKM, pembinaan pengajar, Pengembangan Kompetensi Santri, pengembangan DKM, Pengelolaan PSAA, RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat), kerja sama. b. Penghitungan Biaya Pesantren berbasis Kewirausahaan Sosial Agribisnis Al-Ittifaq Ciwidey Kabupaten Bandung (Biaya tes masuk, Biaya ta’aruf pengenalan santri baru, Biaya kesantrian, Biaya proses pembelajaran, Biaya kegiatan ekstra kurikuler, biaya buku pelajaran, Biaya kitab-kitab kuning, Buku pegangan guru, insentif guru, insentif guru piket, biaya pelatihan, biaya ATK, biaya pembinaan guru, biaya UTS,

biaya UAS, biaya ujian akhir, biaya ujian khusus, biaya kesehatan, makan santri, asrama, Biaya pembangunan gedung baru, Biaya perawatan gedung lama, Biaya perbaikan dan rehab, listrik, telepon, internet, kebersihan. Implementasi PP Al Ittifak Ciwidey merupakan salah satu pesantren yang menerapkan model manajemen pembiayaan berbasis kewirausahaan sosial agribisnis. Model manajemen pembiayaan berbasis kewirausahaan sosial agribisnis tersebut ditempuh melalui keterakitan sejumlah komponen sistem, yaitu: komponen input (instrumental dan lingkungan); komponen proses: kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban; serta output yaitu lulusan yang unggul dalam sikap, pengetahuan, serta keterampilan dibidang agama dan agribisnis. c. Distribusi dan Alokasi Biayaan Pesantren berbasis Kewirausahaan Sosial Agribisnis Al-Ittifak Ciwidey Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis Al-Ittifak Ciwidey Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui sejumlah tahap, yaitu: a. Melaksanakan analisis input terutama menganalisis kebijakan pembiayaan pendidikan dalam wujud undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan rumusan kebijakan pembiayaan pesantren, dan lingkungan baik internal berupa kepemimpinan kewirausahaan sosial kiyai dan pemenuhan komponen pendidikan maupun lingkungan eksternal pesantren berupa ketersediaan lahan dan aktivitas agribisnis untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dimiliki pesantren. Pelaksanaan pembiayaan mengorganisir pembiayaan dan melaksanakan pembiayaan PPAI dengan mendistribusikan dan mengalokasikan pembiayaan untuk membiayai program dan kegiatan pesantren.

Pengawasan pembiayaan (*controlling*) pesantren berbasis Kewirausahaan Sosial Agribisnis Al-Ittifak Ciwidey Kabupaten Bandung diarahkan pada pengawasan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi pembiayaan. Pengawasan mempraktikkan prinsip-prinsip pengawasan, yaitu: (1) pengawasan dikaitkan dengan tujuan dan kriteria yang dipergunakan dalam sistem pendidikan, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas; (2) pengawasan disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi; (3) pengawasan mengacu pada tindakan perbaikan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara

Badrudin, 2020

memeriksa keuangan yang meliputi transaksi, dokumen, buku keuangan, daftar, serta laporan keuangan

Pertanggungjawaban Pembiayaan (*accountability*) pesantren berbasis Kewirausahaan Sosial Agribisnis Al-Ittifak Ciwidey Kabupaten Bandung disampaikan kepada semua *stakeholder* atau pihak yang berkepentingan. *Stakeholder* internal meliputi pihak yayasan, dewan pendidik, dan pengelola pesantren. Adapun *stakeholder* eksternal pesantren di antaranya orang tua santri, masyarakat pengguna lulusan, dan Pemerintah.

Evaluasi pembiayaan (*auditing*) Pesantren berbasis Kewirausahaan Sosial Agribisnis Al-Ittifak Ciwidey Kabupaten Bandung dilakukan secara efektif. Evaluasi (*auditing*) dilakukan komprehensif terhadap sumber, alokasi, distribusi, proses manajemen, capaian target, serta dampak. Analisis evaluasi dipakai untuk:

- a. Menghitung biaya peningkatan angka lulusan pendidikan pesantren (*enrollment rate*), unsur kinerja keuangan, dan penurunan angka mengulang (*recycle rate*), atau penurunan angka putus pesantren (*drop out rate*) semata.
- b. Menilai dampak pembiayaan terhadap individu, organisasi, masyarakat, lembaga, dan sistem sosial serta respon terhadap dampak kebijakan. Hasilnya digunakan untuk melakukan perbaikan dan inovasi kinerja keuangan dan manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial di masa atau tahun mendatang.
- c. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Kekuatan model manajemen Pembiayaan Pesantren berbasis Kewirausahaan Sosial Agribisnis Al-Ittifak Ciwidey Kabupaten Bandung yaitu: a. Ketersediaan lembaga koperasi pondok pesantren, b. kepemimpinan kewirausahaan sosial kiyai, dan c. penerapan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan efisien..

Model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis sebagai proses implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pembiayaan pesantren yang diadaptasi dari Pondok Pesantren Al Ittifak Ciwidey menghasilkan Model IPOO dilaksanakan melalui tahapan-tahapan: a. Input

Badrudin, 2020

**PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN PESANTREN**

**BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL AGRIBISNIS AL ITTIFAK CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(instrumental yaitu kebijakan dan komponen pendidikan dan input environmental berupa lingkungan internal dan eksternal terutama kepemimpinan kewirausahaan sosial serta ketersediaan lahan agribisnis); b. Proses yaitu: P (*Planning* ‘Perencanaan’), I (*Implementation* ‘Implementasi’), C (*Controlling* ‘Pengawasan’), A (*Accountability* ‘Pertanggungjawaban’), E (*Evaluation* ‘audit’), dan; c. *Output* (manajemen pembiayaan efektif); dan d. *Outcome* (kepercayaan masyarakat meningkat, pesantren produktif, santri kompetitif, SDM sejahtera).

## **B. Implikasi**

1. Kebijakan Pembiayaan Pesantren berbasis Kewirausahaan Sosial Agribisnis Al-Ittifak Ciwidey Kabupaten Bandung telah dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik melibatkan kiyai, para pendidik, pengurus yayasan, pengurus koperasi pondok pesantren, para santri dan masyarakat. Implikasinya jika ingin menerapkan model manajemen pembiayaan berbasis kewirausahaan sosial agribisnis perlu ada kebijakan yang mendukung model manajemen tersebut.
2. Manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis memiliki lahan agribisnis yang luas, dengan demikian pesantren yang ingin mengadopsi pengalaman PP Al Ittifak Ciwidey dalam menerapkan model manajemen pembiayaan berbasis kewirausahaan sosial agribisnis hendaknya memenuhi persyaratan yaitu: 1) Memiliki potensi lingkungan yang cocok untuk penerapan agribisnis; 2) Menerapkan pendekatan sistem dalam praktik pembiayaan pesantren, yaitu memiliki kelengkapan sejumlah komponen: komponen *input* (instrumental dan lingkungan); komponen *proses*: kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban; serta komponen *output* yaitu lulusan yang unggul dalam sikap, pengetahuan, serta keterampilan dibidang agama dan agribisnis.
3. Implementasi pembiayaan pesantren merupakan otoritas Kiyai terutama pada pesantren *salafiyah* ‘tradisional’. Terdapat sejumlah permasalahan tata kelola pesantren di antaranya pembiayaan pesantren selama ini tidak merupakan rangkaian fungsi manajemen yang sistematis dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi atau audit. Untuk memperoleh hasil yang

Badrudin, 2020

**PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN PESANTREN  
BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL AGRIBISNIS AL ITTIFAQ CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

maksimal, implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam menerapkan model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis harus merupakan rangkaian sistematis dan continyu dari input, proses, output, sampai outcome terse

4. Agar implementasi manajemen Pembiayaan Pesantren berbasis Kewirausahaan Sosial Agribisnis berhasil maka perlu adanya dukungan berupa: a. Koperasi pondok Pesantren. b. kepemimpinan kewirausahaan sosial kiyai. c. penerapan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta d. dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Peran manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis terhadap mutu pesantren berkontribusi baik dalam meningkatkan mutu pesantren terutama mutu proses dan hasil pembelajaran sehingga meningkatkan mutu lulusan pesantren. Oleh karena itu layak dikembangkan implementasi model manajemen pembiayaan pesantren di sejumlah pesantren di Indonesia yang memiliki tipologi dan karakteristik yang sama dengan PPAI. Pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial sangat menunjang penyelenggaraan pendidikan di pesantren serta merupakan komponen penting pendidikan yang menunjang proses pembelajaran. Pembelajaran menjadi *core business* pendidikan di pondok pesantren. Dukungan pembiayaan yang memadai mendukung capaian tujuan pembelajaran di pesantren secara optimal.
6. Model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis merupakan proses implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pembiayaan pesantren yang diadaptasi dari PP Al Ittifak Ciwidey dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang dirangkum dalam akronim IPOO: a. Input; b. Proses yaitu: P (*Planning* ‘Perencanaan’), I (*Implementation* ‘Implementasi’), C (*Controlling* ‘Pengawasan’), E (*Evaluation* ‘audit/evaluasi’), dan A (*Accountability* ‘Pertanggungjawaban’); c. *Output*; dan d. *Outcome*. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial perlu mengadaptasi dan menerapkan konsep model manajemen pembiayaan berbasis kewirausahaan sosial agribisnis Al Ittifak Ciwidey Kabupaten Bandung.

Badrudin, 2020

**PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN PESANTREN  
BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL AGRIBISNIS AL ITTIFAQ CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa hal yang dapat menjadi masukan berguna bagi semua pihak, di antaranya:

#### **1. Bagi Pihak Pesantren**

Bagi Pihak PPAI dituntut terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam meningkatkan mutu manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis agar dapat meningkatkan capaian tujuan pesantren yaitu menghasilkan lulusan pesantren yang memiliki kompetensi bidang ilmu agama dan agribisnis. Pihak Kopontren dan pengelola PPAI diharapkan terus mengembangkan program agribisnis dan bias mengatasi masalah keterbatasan lapangan pekerjaan dengan melihat potensi alam yang bias dikelola sebagai lahan pekerjaan. Untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan kegiatan agribisnis, pihak pesantren hendaknya mencari bentuk dukungan/sponsor kepada pihak yang peduli dengan agribisnis untuk meningkatkan permodalan sehingga mampu meningkatkan lonjakan omzet penghasilan.

Bagi umumnya pesantren di Indonesia, temuan penelitian ini memberikan tawaran solusi terutama bagi para pengelola pesantren yang memiliki kemiripan potensi lingkungan dengan PP Al-Ittifaq Ciwidey agar dapat mengoptimalkan penggalan sumber pembiayaan pesantren melalui penerapan model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis.

#### **2. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penyediaan konsep model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis melalui tersusunnya model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis untuk menciptakan kemandirian ekonomi pesantren di Indonesia melalui penyediaan sumber pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Para peneliti yang tertarik melakukan penelitian pesantren, karena penelitian ini banyak keterbatasan, baru menghasilkan konsep model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis al Ittifak Ciwidey, diharapkan dapat para peneliti dapat melanjutkan dengan uji coba model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial Al Ittifak Ciwidey.